

ABSTRAK

Penggunaan kWh Meter Pascabayar menimbulkan kemungkinan terjadinya kesalahan catat meter oleh oknum petugas PT PLN (Persero). Hal ini dapat menimbulkan adanya dugaan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) selaku Pelaku Usaha maupun Pelanggan selaku Konsumen. Penulisan ini bertujuan untuk melihat tinjauan yuridis atas tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT. PLN (Persero) atas kesalahan catat kWh meter. Penulisan ini juga bertujuan untuk melihat bentuk pertanggungjawaban PT. PLN (Persero) atas kesalahan catat kWh meter kepada konsumen atas kerugian yang diterima. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penulisan ini yaitu deskriptif. Hasil yang didapatkan dari penulisan hukum ini ialah kesalahan catat kWh meter yang dilakukan oleh petugas PT. PLN (Persero) dapat diklasifikasikan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum atas dasar perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, serta kesalahan catat kWh meter telah melanggar hak dan kewajiban yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hasil kedua yang didapat dari penelitian ini ialah bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) atas kerugian konsumen sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Kata Kunci: *Perbuatan Melawan Hukum, Perlindungan Konsumen, Konsumen.*

ABSTRACT

The use of Postpaid kWh Meters creates the possibility of meter recording errors by PT PLN (Persero) officers. This could give rise to allegations of law of tort acts committed by PT PLN (Persero) as business actors and customers as consumers. This writing aims to look at the juridical review of acts against the law committed by PT. PLN (Persero) for errors in recording kwh meters. This writing also aims to see the form of PT's accountability. PLN (Persero) for errors in recording kwh meters to consumers for losses received. The research approach used in writing this law is a normative juridical approach and the research specifications used in this writing are descriptive. The results obtained from writing this law are kwh meter recording errors made by PT officers. PLN (Persero) can be classified as a form of unlawful act on the basis that the act fulfills the elements of an unlawful act, and errors in recording kwh meters violate the rights and obligations contained in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The second result obtained from this research is the form of accountability carried out by PT. PLN (Persero) for consumer losses in accordance with what is regulated in the Law.

Keywords: law of tort, Consumers Protection, Consumers